

21. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* maka dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja akan diarahkan untuk mewujudkan amanat dari peraturan tersebut tetapi tetap berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten / kota terdiri atas :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ada 3 peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut khususnya untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang *Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang *Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

- penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n + 1$;
 4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
 5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Ranwal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementrian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahan) dan Renja Provinsi (Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahn dan Renja Satpol PP Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan |
| BAB II | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisikan uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025. |
| BAB V | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat dalam *Tabel 2.1* sebagai berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05				Urusan Pemerintahan									
					Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
					Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,41%	2,01%	3,87%	3,94%	101.81%	5,92%	5,92%	56.87%
					Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	14,64%	4,36%	6,40%	6,53%	102.03%	8,68%	8,68%	59.29%
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	99,39%	93,59%	95,64%	96,15%	100.53%	96,89%	96,89%	97.48%

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	99,04%	94,20%	95,06%	95.17%	100.12%	96,39%	96,39%	97.32%
1	05	02	2.01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum		60%	62,05%	20%	20%	20%	20%	102.05%	170.08%
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4 laporan	-	2017 kasus	1369 kasus	67.87%	1842 laporan	1842 laporan	-
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	4 laporan	-	1929 kasus	1680 kasus	87.09%	1785 laporan	1785 laporan	-

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	36 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	66.67%
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66.67%
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	135 orang	41 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	131 orang	97.04%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Hak Asasi Manusia									
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	33.33%
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani dan jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	66.67%
1	05	02	2.02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	02	2.02	010	Sosialisasi Penegakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	3 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada								
1	05	02	2.02	012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 laporan	6 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	30 laporan	83.33%
1	05	02	2.02	011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
1	05	02	2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	05	02	2.03		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	6 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	16.67%

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65	-	0,58	0,43	74,14%	0,60	0,60	92.31%
					Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	94%	-	91%	100%	109.89%	92%	100%	108.70%
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Setiap Tahunnya								
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	36 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	5.56%
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	63 unit	-	10 unit	10 unit	100%	23 unit	33 unit	52.38%
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki	36 orang	-	-	-	-	12 orang	12 orang	33.33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran								
1	05	04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedun g/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedun g/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%
1	05	04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam	Persentase relawan kebakaran yang	20%	53%	20%	20%	100%	20%	20%	100%

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pencegahan Kebakaran	memiliki kapasitas siap siaga kebakaran								
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	420 orang	100 orang	140 orang	280 orang	200.00%	140 orang	520 orang	123.81%
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingku ngan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa/ kelurahan	-	-	-	-	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	100%
					Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,41) nilai	A	A (85,25) nilai	A (81,30) Nilai	95,37%	A (85,35)	A (85,35)	100%
					Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,41) nilai	A	A (85,25) nilai	A (81,30) Nilai	95,37%	A (85,35)	A (85,35)	100%

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	44 orang/bulan	45 orang	44 orang	97.78%	45 orang	45 orang	100%
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	13 laporan	108.33%
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	-	6 paket	7 paket	116.67%	7 paket	14 paket	66.67%
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 orang	41 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	131 orang	97.04%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	66.67%
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	-	5 paket	5 paket	100%			
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	-	5 paket	5 paket	100%	5 paket	10 paket	66.67%
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	-	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	66.67%
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	-	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	66.67%
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perundang - undangan	Perundang- Undangan yang Disediakan								
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138 laporan	45 laporan	46 laporan	46 laporan	100%	46 laporan	137 laporan	99.28%
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	-	-	-	0%	2 paket	2 paket	40.00%
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	-	6 unit	6 unit	100%	5 unit	11 unit	91.67%
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 unit	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Disediakan								
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	-	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	48 laporan	50.00%
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	-	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	48 laporan	66.67%
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	-	1 unit	1 unit	100%	5 unit	6 unit	40.00%
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	-	5 unit	5 unit	100%	9 unit	14 unit	51.85%
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	5 unit	71.43%
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	3 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	33.33%

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 tidak ada atau NIHIL.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE KETERCAPAIAN
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	100%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	100%
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	20%	20%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%

Faktor pendorong yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

2. Target yang telah direncanakan sudah tepat.

Sedangkan faktor penghambat tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kualifikasi, kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang ada.
2. Kepedulian staf terhadap penilaian kinerja organisasi masih rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan staf terhadap hasil penilaian kinerja.
3. Belum tersedianya data gangguan ketentraman ketertiban umum yang disusun secara sistematis dan akurat.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

- Melakukan perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam menentukan target kinerja.

Adapun Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE KETERCAPAIAN
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	95,64%	96,15%	100.53%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	81,50 indeks	83,50 Indeks	102,45%

Faktor – faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

1. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparat pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat ditunjukkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

NO	Indikator	IKU/IKK /SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	IKU	4,39%	6,40%	8,68%	11,40%	14,64%	4,36%	6,53%	8,68%	11,40%	14,64%	Realisasi tahun 2023 diatas target
2.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	IKU	90%	91%	92%	93%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi tahun 2023 diatas target
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	IKK	94,38%	95,64%	96,89%	98,14%	99,39%	93,89 %	96,15%	96,89%	98,14%	99,39%	Realisasi tahun 2023 diatas target
4.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	IKK	93.74%	95.06%	96.39%	97.71%	99.04%	94,20 %	95,17%	96.39%	97.71%	99.04%	Realisasi tahun 2023 diatas target
5.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi tahun 2023 sesuai target

NO	Indikator	IKU/IKK /SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	IKK	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	13,13 menit	10,91 menit	10,91 menit	10,91 menit	10,91 menit	Realisasi tahun 2023 diatas target
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Realisasi tahun 2023 sesuai target
11.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Realisasi tahun 2023 sesuai target

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung *Misi ke 1* “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”, *Tujuan ke 1* “Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis”, *Sasaran ke 2* “Meningkatnya ketertiban umum” dan *Misi ke 4* “Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”, *Tujuan ke 3* “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, *Sasaran ke 5* “Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana”. Apabila target kinerja tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda dan perkara di Kota Blitar;
- ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar;
- ❖ Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal;
- ❖ Penanganan kejadian kebakaran belum optimal;
- ❖ Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran belum optimal;
- ❖ Terbatasnya ketersediaan anggaran.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Keterbatasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja ;
- ❖ Keterbatasan jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi ;
- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penegak perda;
- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran;
- ❖ Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan ;
- ❖ Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya .

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- ❖ Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna ;

- ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal ;
- ❖ Dinamika masyarakat yang semakin kompleks ;
- ❖ Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal ;
- ❖ Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda ;
- ❖ Koordinasi antara Perangkat Daerah terkait belum berjalan secara optimal .

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- ❖ Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum ;
- ❖ Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya ;
- ❖ Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
2. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna
3. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan
4. Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD belum optimal
5. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
6. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

7. Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran yang merupakan amanat Permendagri No 114 tahun 2018.
8. Pembentukan Satgas Linmas sesuai dengan amanat Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan trantibum dan linmas.

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dalam penegakan perda dan perkara direncanakan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan lebih taat jadwal .
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku.
3. Menambah volume kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban umum agar bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar.
4. Mengoptimalkan koordinasi antara perangkat daerah .
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang melibatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat melalui pembentukan Satgas Linmas.
7. Mengoptimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/ Kota*

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan salah satu prioritas pembangunan daerah yaitu Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintah dan Berbasis Digital dan Investasi yang telah di tetapkan sebagaimana dalam *Tabel 2.3* sebagai berikut .

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 nilai	7.171.894.954,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 nilai	8.071.894.954,00	- Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah - Penyesuaia n pagu anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	22.404.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	22.404.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	4.043.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	4.043.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	18.361.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	7 laporan	18.361.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	5.988.495.804,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	6.888.495.804,00	Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang / bulan	5.987.435.304,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang / bulan	6.887.435.304,00	Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	1.060.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	1.060.500,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	214.671.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	214.671.500,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	7 paket	132.627.700,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	7 paket	132.627.700,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	45 orang	82.043.800,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	45 orang	82.043.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai	100%	248.200.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum	100%	248.200.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			standar					perangkat daerah sesuai standar			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.738.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.738.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	20.712.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	20.712.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	7.623.800,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	7.623.800,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	14.700.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan ogistic kantor yang disediakan	12 paket	14.700.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	8.882.600,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	8.882.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	5.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	5.400.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	46 laporan	181.143.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	46 laporan	181.143.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	145.005.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	145.005.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	41.501.700,00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	41.501.700,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	103.504.100,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	103.504.100,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	197.615.124,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	197.615.124,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	66.503.124,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	66.503.124,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	131.112.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	131.112.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	355.501.926,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	355.501.926,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	242.970.300,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	242.970.300,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	1.800.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	1.800.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	20.739.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	20.739.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	89.992.626,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	89.992.626,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	98,14%	4.129.240.570,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	98,14%	4.129.240.570,00	
		Kota Blitar	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	97,71%			Kota Blitar	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	97,71%		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	3.088.937.736,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	3.088.937.736,00	
		Kota Blitar	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum				Kota Blitar	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	80.933.800,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	80.933.800,00	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan	1 dokumen	114.544.736,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan	1 dokumen	114.544.736,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Ketertiban Umum					dan Ketertiban Umum			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Blitar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	175.570.100,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Blitar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	175.570.100,00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	2.679.241.100,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	2.679.241.100,00	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	38.648.000,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	38.648.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	1.029.955.634,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	1.029.955.634,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	553.375.843,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	553.375.843,00	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	464.115.991,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	464.115.991,00	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12.463.800,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12.463.800,00	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	10.347.200,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	10.347.200,00	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	10.347.200,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	10.347.200,00	
	PROGRAM PENCEGAHAN,	Kota	Persentase kejadian	100%	516.538.700,00	PROGRAM PENCEGAHAN,	Kota	Persentase kejadian kebakaran yang	100%	516.538.700,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Blitar	kebakaran yang tertangani			PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Blitar	tertangani			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	37.975.100,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	37.975.100,00	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	6.899.000,00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggg ulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	6.899.000,00	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	10.020.000,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	10.020.000,00	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	3.354.000,00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaku asi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non	12 dokumen	3.354.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Kebakaran			
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	12 orang	9.841.700,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	12 orang	9.841.700,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 unit	7.860.400,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 unit	7.860.400,00	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	300.698.916,00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	300.698.916,00	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	294.896.116,00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	294.896.116,00	
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	5.802.800,00	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	5.802.800,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Kota	Persentase relawan kebakaran yang memiliki	20 orang	177.864.684,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Kota	Persentase relawan kebakaran yang	20 orang	177.864.684,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencegahan Kebakaran	Blitar	kapasitas siap siaga kebakaran			Pencegahan Kebakaran	Blitar	memiliki kapasitas siap siaga kebakaran			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	122.675.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	58.834.000,00	Rincian Menyesuaikan kebutuhan
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa / kelurahan	55.189.684,00	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa / kelurahan	119.030.684,00	Rincian Menyesuaikan kebutuhan

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan pembangunan pada tahun 2025. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran usulan tersebut belum bisa diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025, Usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam *Tabel 2.4* berikut .

- 2007 -

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Blitar

No	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			--- NIHIL ---			

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan“. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan kedalam 5 agenda pembangunan, sedangkan yang berkaitan dengan tusi Satpol PP sebagai berikut :

Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan agenda :

- (1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
 - a. Pembangunan bidang hukum
 - b. Pembangunan bidang keamanan
 - c. Pembangunan bidang demokrasi
- (2) Stabilitas ekonomi makro
 - a. Optimalisasi pendapatan negara
 - b. Peningkatan kualitas belanja negara
 - c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
- (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2025 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar Tahun 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1.	Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran	3,87	3.94	5,92	8,06	10,41

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			masyarakat terhadap aturan perda dan perkara terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi					
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah	6,40	6,53	8,68	11,40	14,64
3.	Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di Tingkat kabupaten /kota dan provinsi.	0,58	0,58	0,60	0,62	0,65
4.	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.	91	100	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Lokasi kejadian kebakaran.					
5.	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	85,25	81,30	85,35	85,37	85,39
6.	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	85,25	81,30	85,35	85,37	85,39

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran di Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa strategi, yaitu :

1. Peningkatan penegakan perda, dengan kebijakan mereviu kembali Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum yang belum memiliki sanksi yang mengikat.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, dengan kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat/Satuan perlindungan masyarakat dalam cipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum.

3. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan kebijakan optimalisasi peran serta tenaga relawan pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan non kebakaran. Serta meningkatkan kompetensi tenaga pemadam kebakaran melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi baik internal maupun eksternal yang diselenggarakan pihak terkait.
4. Peningkatan kinerja dan pelayanan perangkat daerah, dengan kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja, serta meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 selain melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, rumusan program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

1. Mendukung Misi ke 1 “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”, dan Misi ke 4 “Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”;
2. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya;
4. Tindaklanjut LKJiP Tahun 2023; dan
5. Pencapaian program prioritas daerah dan perangkat daerah

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025 adalah 3 program, 13 kegiatan, dan 39 sub kegiatan. Jumlah kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 12.717.674.224,00 yang penganggarnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 11.967.674.224 (94,11%) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 750.000.000 (5,89%). Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana *Tabel 3.2* berikut :

Tabel 3.2

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05				Urusan Pemerintahan		
					Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
					Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	
					Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	
						Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	
1	05	02	2.01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	
					Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum		
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						Umum	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	
1	05	02	2.02	010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.02	011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.02	012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	
1	05	02	2.03		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
					Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	
					Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	
1	05	04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						diinspeksi	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
					Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
					Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Mendukung pencapaian tupoksi

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mendukung pencapaian tupoksi

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian tupoksi

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan tahun 2025 dan pagu indikatif tahun 2025 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Untuk mendukung pencapaian sasaran, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025 serta mendukung terwujudnya target capaian nasional, provinsi dan daerah.

4.1. Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025, juga memuat tindak lanjut LKJIP Tahun 2023, sebagaimana pada tabel 4.1 berikut.

Tabel. 4.1. Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Lebih mengintensifkan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Melaksanakan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
2.	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan teknis kepada aparaturnya pemadam kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
3.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
4.	Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi.	Melaksanakan sosialisasi dan penekanan tugas dari Kepala kepada seluruh ASN yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas perangkat daerah maupun operasional yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada table 4.2. berikut ini.

- 2022 -

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Blitar		12.717.674.224,00				12.972.005.233,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kota Blitar		12.717.674.224,00				12.972.005.233,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	82 Nilai	8.071.894.954,00				6.945.787.678,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	22.404.800,00				21.309.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	4.043.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	3.146.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	18.361.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan	18.163.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	6.888.495.804,00				5.648.955.978,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/bulan	6.887.435.304,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang/bulan	5.647.997.378,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	1.060.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	958.600,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar			214.671.500,00				194.439.200,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		7 Paket	132.627.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	138.085.300,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-		45 Orang	82.043.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang	56.353.900,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Undangan							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	248.200.000,00				249.139.800,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.738.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.670.200,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	20.712.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	18.323.700,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	7.623.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	6.258.500,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	14.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	14.175.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	8.882.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	7.893.600,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.670.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		46 Laporan	181.143.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 Laporan	189.148.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah			145.005.800,00				108.500.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan sesuai kebutuhan							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	41.501.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	63.706.800,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	103.504.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	44.794.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar			197.615.124,00				237.072.200,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	66.503.124,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	69.828.200,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 Laporan	131.112.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	167.244.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	355.501.926,00				486.369.900,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit	242.970.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	302.691.000,00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	5 Unit	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	1.890.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kel/Desa						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	20.739.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	19.584.900,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	89.992.626,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	162.204.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan		98.14 % 97.71 %	4.129.240.570,00				5.436.138.955,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti		100%	3.088.937.736,00				4.296.907.755,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	80.933.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	739.836.625,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan	Kota Blitar, Semua Kecamatan	1 Dokumen	114.544.736,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	510.191.430,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketertiban Umum	Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n, Semua Kel/Desa						
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	175.570.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang	170.639.200,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 laporan	2.679.241.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	2.829.694.100,00
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	38.648.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	46.546.400,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada			1.029.955.634,00				1.081.438.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	553.375.843,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1 Laporan	615.883.000,00
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	464.115.991,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		12 Laporan	454.115.800,00
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.463.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	11.439.600,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan			10.347.200,00				50.000.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	10.347.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	50.000.000,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani			516.538.700,00				597.871.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEBAKARAN								
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			37.975.100,00				47.107.400,00
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.899.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.246.600,00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	15.283.800,00
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.354.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	3.603.600,00
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	9.841.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang	11.331.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kebakaran							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	7.860.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	9.642.300,00
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi			300.698.916,00				322.650.700,00
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	294.896.116,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	307.271.700,00
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.802.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.379.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran			177.864.684,00				228.113.300,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	140 Orang	58.834.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		140 Orang	182.113.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kebakaran Setiap Tahunnya	Kel/Desa						
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Desa/Kelurahan	119.030.684,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Desa/Kelurahan	46.000.000,00
					12.717.674.224,00				12.972.005.233,00

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 difokuskan pada :

- a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS;
- b. Pembuatan SOP penanganan PMKS;
- c. Pemberian sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
- d. Pengoptimalan layanan pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pengintegrasian patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Penyusunan rencana penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
- g. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran;
- h. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018;
- i. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- j. Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi;
- l. Pengoptimalan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan cara edukatif dan humanis;
- m. Penguatan pengumpulan data pendukung capaian SPM yang berupa pendataan jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 ;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
- d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.